



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian Kabupaten Kotawaringin Barat disusun berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2018. Sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi pemerintah Kotawaringin Barat yaitu "*Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas*" sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, 2 Februari 2018

KEPALA DINAS,

RODY ISKANDAR, S. Sos, M. Si.

Nip. 19690831 199012 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
a. Visi dan Misi	8
b. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
c. Pengukuran Kinerja.....	21
d. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	23
e. Akuntabilitas Keuangan.....	30
BAB IV. PENUTUP.....	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 menyajikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Hasil capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan secara umum telah sesuai dengan yang ditargetkan. Rata-rata capaian sasaran strategis tersebut adalah 100%. Total anggaran untuk melaksanakan sasaran-sasaran tersebut sebesar Rp. 971.486.900,- dan dilakukan perubahan pada P-APBD dengan jumlah yang pagu yang sama Rp. 870.750.300,- Perubahan anggaran dilakukan dari efisiensi pengadaan maupun sosialisasi. Capaian kinerja sasaran dan capaian realisasi anggaran tersebut menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran.

Capaian kinerja sasaran strategis beserta realisasi anggarannya adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya layanan publik berbasis teknologi informasi** memiliki capaian kinerja 100%.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah sebesar Rp. 560.680.000,- dilakukan perubahan pada P-APBD menjadi Rp. 541.801.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 527.316.381,- (97,32%).

2. **Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government, data statistik dan pengamanan data** memiliki capaian kinerja 100%.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah sebesar Rp. 410.806.900,- dilakukan perubahan pada P-APBD menjadi Rp. 328.948.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 291.286.914,- (88,55%).

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun



anggaran 2018 dapat terlaksana dengan baik sesuai target (100%). Bila dikaitkan dengan Target sasaran RPJMD yang dapat di capai pada tahun 2018 yaitu :

1. Sasaran 1:

Indek Domain Layanan SPBE

Target RPJMD tahun 2018 sebesar 100%, capaian kinerja terealisasi sebesar 100% sehingga target yang ditetapkan tercapai dengan tingkat capaian sebesar 100% yang berarti semua kegiatan dapat diselesaikan dengan baik.

2. Sasaran 2:

Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE dan Indeks Domain Tata Kelola SPBE

Target RPJMD tahun 2018 sebesar 100% capaian kinerja terealisasi sebesar 100%, sehingga target yang ditetapkan tercapai dengan tingkat capaian sebesar 100% yang berarti semua kegiatan dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pelaksanaan kegiatan dan program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kotawaringin Barat pada tahun 2018 Capaian Indikator Kinerja yaitu 100%, menunjukkan *kinerja sangat baik*.



BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pada penyelenggaraan pemerintahan, agar program dan kegiatan yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dapat menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat, diperlukan sarana penyampaian informasi dari masyarakat yang selanjutnya diolah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan dan informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Proses tersebut, diperankan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat, dan akan terasa cepat tepat, apabila memanfaatkan mekanisme komunikasi dengan informatika, yakni dengan menggabungkan antara informasi, komunikasi, dan telematika. Dengan kata lain, informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi (*information of technology*).

Pembentukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 57 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Melalui Peraturan Daerah dimaksud, diharapkan terjadi penguatan kelembagaan dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian, sehingga sejalan dengan tujuan pemerintah saat ini yang mengedepankan penggunaan teknologi (elektronik) dalam menunjang kinerja pelayanan birokrasi. Hal ini sangat terkait bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah untuk mewujudkan *good governance*, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *E-Government*. *E-Government* didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi



komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pelaksanaan tugasnya.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Evaluasi, pengendalian dan pelaporan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
3. Bimbingan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
5. Pembinaan jabatan fungsional; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

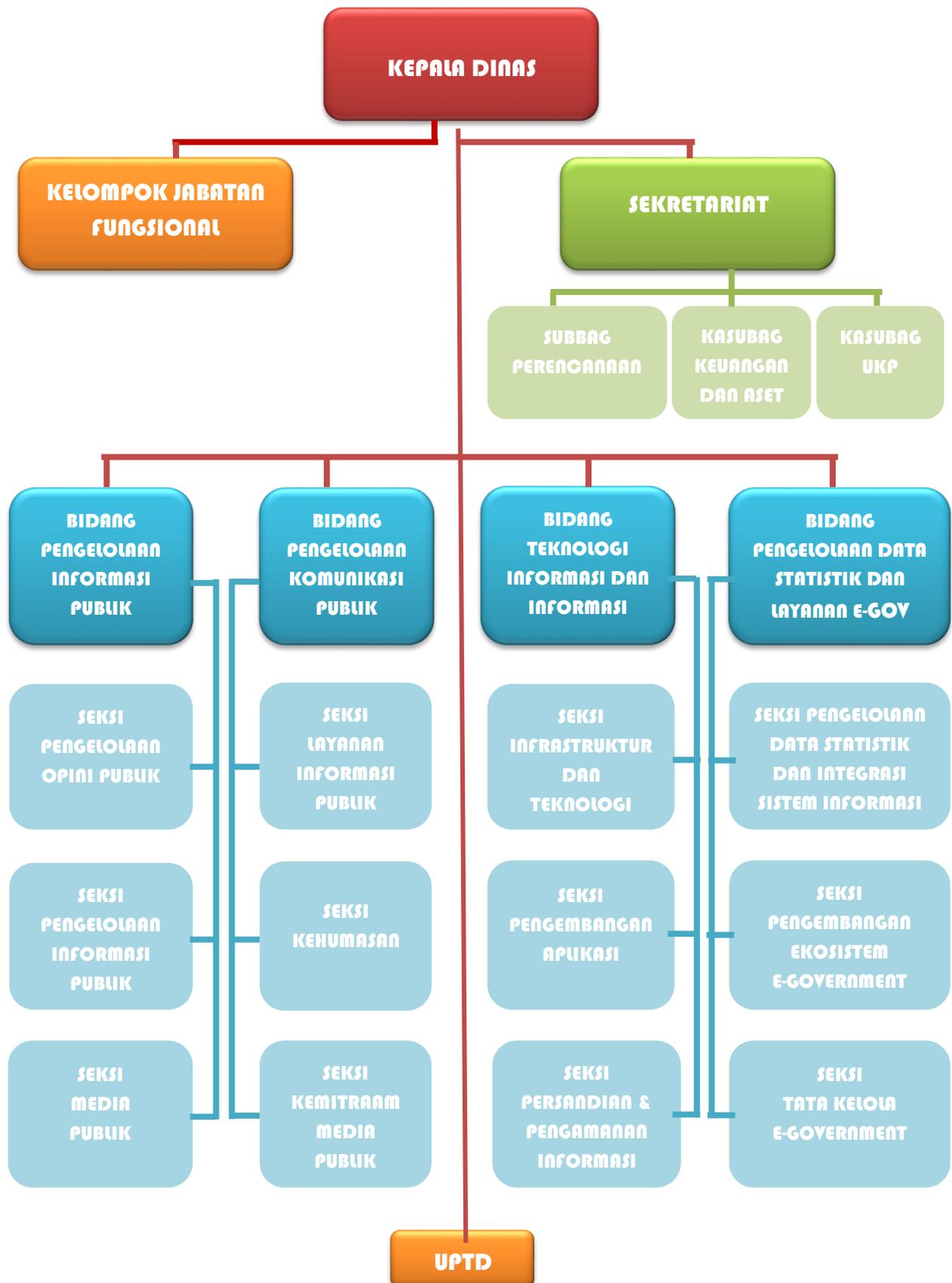


B. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Pengendalian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang
 - 1) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik terdiri dari
 - a) Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 - b) Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 - c) Seksi Media Publik.
 - 2) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik terdiri dari
 - a) Seksi Layanan Informasi Publik
 - b) Seksi Kehumasan
 - c) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik
 - 3) Bidang Teknologi Informasi dan Persandian terdiri dari
 - a) Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - b) Seksi Pengembangan Aplikasi
 - c) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
 - 4) Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Layanan *E-Government* terdiri dari
 - a) Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi
 - b) Seksi Pengembangan Ekosistem *E-Government*
 - c) Seksi Tata Kelola *E-Government*
4. Jabatan Fungsional
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:





Berdasarkan keadaan pada 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 jumlah pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah seperti tertera sebagai berikut :

No.	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Struktural :	
	Eselon II b	1
	Eselon III a	1
	Eselon III b	4
	Eselon IV a	14
	Jabatan Fungsional Umum	15
	Tenaga Kontrak	8
	Jumlah	42

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, antara lain :

1. Belum Optimalnya Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat serta Lembaga Profesi dalam Penyebarluasan Informasi
2. Perlunya Penguatan peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan serta Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan secara berkelanjutan
3. Implementasi interoperabilitas e-government (integrase system informasi pemerintahan) belum dilaksanakan di semua Perangkat Daerah
4. Perlunya peningkatan keamanan informasi dan persandian daerah.
5. Masih banyaknya desa yang belum terjangkau sebaran teknologi informasi atau blankspot
6. Belum tercukupinya kompetensi SDM yang secara optimal mendukung tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Kotawaringin Barat.



C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penulisan LAKIP Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat 2018 adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

Disebutkan pula langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi seperti dasar hukum pembentukan instansi, struktur organisasi instansi, uraian singkat tentang tugas dan fungsi instansi, kondisi geografis dan demografis instansi sumber daya alam serta keunggulan lainnya yang dimiliki instansi yang bersangkutan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi uraian singkat tentang rencana jangka menengah organisasi mulai visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program. Khusus untuk sasaran akan lebih baik lagi kalau disajikan dalam bentuk tabel yang merinci kapan sasaran-sasaran akan dicapai dalam suatu periode Renstra.

Pada bagian berikutnya disajikan kinerja yang diperjanjikan akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan anggaran yang telah disetujui.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pada bagian awal bab ini terlebih dahulu disajikan capaian kinerja setiap sasaran secara keseluruhan dan masing-masing sasaran harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai. Misalkan suatu instansi mempunyai 8 sasaran, maka dalam bagian ini mesti diungkapkan berapa sasaran yang berhasil dan berapa sasaran yang gagal dicapai.



B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini diuraikan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap sasaran, perbandingan data kinerja, faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran, hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Sistematika pembahasan dalam bagian ini disarankan untuk menguraikan analisis akuntabilitas kinerja setiap sasaran satu persatu. Artinya, setiap sasaran diuraikan secara tuntas mulai dari capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, sampai dengan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada bagian ini disajikan anggaran dan realisasi keuangan untuk setiap sasaran, sehingga terlihat keterkaitan antara kinerja dengan aspek keuangannya

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung program kerja Bupati Kotawaringin Barat yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan visi *“Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas”* dan sebagai perwujudan dari bagian rencana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat Visi tersebut dijabarkan dengan **Misi** sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olah raga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata;



Sejalan dengan visi dan misinya, telah diidentifikasi beberapa tujuan daerah yang akan melandasi program program unggulan kepala daerah yang telah menjadi komitmen politis serta diintegrasikan dalam perencanaan teknokratisnya meliputi:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi
2. Peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan
3. Peningkatan Kualitas SDM
4. Pengembangan komoditi unggulan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan menopang perekonomian daerah
5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah
6. Pengembangan industri koperasi dan UMKM serta daya saing daerah
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana berdasarkan asas konservasi, efisien dan lestari
8. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah
9. Peningkatan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas
10. Peningkatan pemahaman kesadaran dan pengalaman beragama
11. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
12. Peningkatan ketertiban dan ketenteraman masyarakat
13. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya
14. Peningkatan pariwisata daerah

Dengan memperhatikan rangkaian visi hingga program prioritas kepala daerah di atas, serta dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dapat ditarik relevansi hubungannya sebagai berikut :

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu lembaga teknis yang bertugas dan bertanggungjawab atas penyebarluasan informasi komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan keamanan persandian mempunyai peranan penting dalam perwujudan visi Bupati tersebut, khususnya berkaitan dengan misi



pertama yaitu : *“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”*.

Dalam rangka pencapaian misi pertama di atas maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut: *“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (GOOD GOVERNANCE)”*, dengan sasaran pembangunan yang meliputi:

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan
2. Meningkatnya system akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa

Dimana sasaran yang ketiga adalah yang secara langsung berkaitan dengan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat. Linieritas antara Misi 1 RPJMD hingga Sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat yang diacu oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digambarkan sebagai berikut :



Dari sasaran Nomor 3 yaitu *"Meningkatkan Kualitas layanan Publik Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi"* ditetapkan tujuan, sasaran program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat terkait dengan Misi Nomor 1 yaitu *"Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan"* adapun Tujuan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat adalah *"Meningkatkan tata kelola kelola pemerintahan pemerintahan yang baik, dan layanan public berbasis teknologi informasi"* digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Tujuan dan indikator kinerja tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan layanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks SPBE	1,86



Sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

1. Meningkatkan layanan public berbasis teknologi informasi
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis E-Government, data statistic dan pengamanan data

digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran dan indikator kinerja Sasaran

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya layanan public berbasis teknologi informasi	Indeks Domain Layanan SPBE	1,3
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis E-Government, data statistik dan pengamanan data	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	0,4
		Indeks Domain Layanan SPBE	0,19



Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan pada sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Sasaran RPJMD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat bertujuan untuk Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis E-Government dengan indicator sasaran Indeks E-Gov (Sistem Pemerintahan berbasis elektronik/SPBE)

Adapun Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjadi acuan untuk periode tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	1	Indeks Domain Layanan SPBE (Bobot 55%)	NA	1,3	1,3	1,45	1,7	1,85	1,85
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis E-Government, Data Statistik dan Pengamanan Data	2	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Bobot 17%)	NA	0,19	0,36	0,43	0,50	0,51	0,51
		3	Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Bobot 28%)	NA	0,4	0,64	0,72	0,80	0,84	0,84



Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 terdiri dari 5 program prioritas dan 4 program pendukung antara lain:

a. Program Prioritas

1. Program Pengembangan Infrastruktur, Komunikasi dan Informatika
 - 1) Kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - 2) Kegiatan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berkualifikasi
2. Program Implementasi dan Pengembangan E-Government
 - 1) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya TIK Daerah
 - 2) Kegiatan Penerapan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi
 - 3) Kegiatan Pelayanan Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi
3. Program layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah daerah
 - 1) Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah daerah
 - 3) Kegiatan Pengelolaan Konten Media Publik
4. Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah daerah
 - 1) Kegiatan Pengembangan Kemitraan Komunikasi Publik
 - 2) Kegiatan Pengembangan layanan Hubungan Komunikasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah daerah
 - 3) Kegiatan Layanan Penyediaan Informasi Pemerintah daerah
5. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
 - 1) Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik daerah

b. Program Pendukung

1. Program Layanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
 - 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 11) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Pembangunan Gedung Kantor
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 1) Kegiatan Pengadaan Mesin/kartu Absensi
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
 - 1) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



Cascading Dinas Komunkasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	1 Meningkatkan layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	1 Indeks Domain Layanan SPBE (Bobot 55%)	1 Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah daerah	1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Yang dilaksanakan	
							2	Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah daerah	Jumlah Informasi Publik Pemerintah Daerah Yang Dikelola	
							3	Pengelolaan Konten Media Publik	Jumlah Konten Media Publik Yang Dikelola	
					2	Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah daerah	Cakupan Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah daerah	1	Pengembangan Kemitraan Komunikasi Publik	Jumlah Kemitraan Komunikasi Publik Yang Dikembangkan
								2	Pengembangan Layanan Hubungan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Hubungan Komunikasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Dikembangkan
								3	Layanan Penyediaan Informasi Pemerintah daerah	Jumlah Layanan Informasi Pemerintah daerah Yang Disediakan



			2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis E-Government, Data Statistik dan Pengamanan Data	2	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Bobot 17%)	1	Pengembangan Infrastruktur, Komunikasi dan Informatika	Cakupan Pengembangan Infrastruktur, Komunikasi dan Informatika	1	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK)	Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) Yang Disediakan, Dikembangkan dan Dipelihara		
							2	Pengamanan Informasi Daerah	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	1	Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berkualifikasi	Jumlah Aplikasi Yang Dikelola dan Diamankan		
							3	Indeks Domain Tata Kelola SPBE (28%)	1	Implementasi dan Pengembangan E-Government	Cakupan Implementasi dan Pengembangan E-Government	1	Pengembangan Sumber Daya TIK Daerah	Jumlah Sumber Daya TIK Yang Dikembangkan
												2	Penerapan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi	Jumlah Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Yang Diterapkan
												3	Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Terintegrasi Yang Dikembangkan
							2	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Tingkat Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	1	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Statistik daerah		





B. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen tahunan yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara Bupati dengan Kepala Dinas untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan didukung sumber daya dan dana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
	Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah monitoring dan aspirasi public yang dilaksanakan	100% (1 kali)	Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	218.966.000
		Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola	100% (1 Buah)		
		Jumlah konten media publik yang di kelola	100% (2 Buah)		
		Jumlah kemitraan komunikasi publik yang dikembangkan	100% (2 Kelompok)	Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah daerah	322.835.900
		Jumlah Layanan Hubungan Komunikasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dikembangkan	100% (1 buah)		
		Jumlah layanan informasi pemerintah daerah yang disediakan	100% (2 Jenis)		
TARGET CAPAIAN SASARAN 1			100%	JUMLAH	541.801.900
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis E-Government, Data Statistik dan Pengamanan Data	Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) yang disediakan, dikembangkan dan dipelihara	100% (2 Unit)	Program Pengembangan Infrastruktur, Komunikasi dan Informatika	72.170.500



		Jumlah informasi yang dikelola dan diamankan	100% (1 Informasi)		
		Jumlah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan	100% (4 Sistem)	Program Implementasi dan Pengembangan E-Government	235.677.900
		Jumlah tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan	100% (3 Peraturan)		
		Jumlah sumberdaya TIK yang dikembangkan	100% (68 Orang)		
		Jumlah dokumen data dan statistik daerah	100% (120 Dokumen)	Program Pengembangan Data.Informasi/S tatistik daerah	
TARGET CAPAIAN SASARAN 2			100%	JUMLAH	328.948.400
TARGET CAPAIAN RATA-RATA			100%	JUMLAH	870.750.300



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 Sasaran Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor. B/195/M.KT.03/2019 tanggal 27 Maret 2019 hal Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2018 dengan capaian 2,47 dengan predikat *cukup* dengan capaian sasaran strategis masing-masing sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Capaian kinerja sasaran strategis "*Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi*" adalah sebagai berikut:

Tabel capaian sasaran strategis 1

INDEKS	NILAI
Domain Layanan SPBE	2,82
Administrasi Pemerintahan	3,00
Pelayanan Publik	2,50

Sasaran Strategis 2

Capaian kinerja sasaran strategis "*Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis E-Government, Data Statistik dan Pengamanan Data*" adalah sebagai berikut:

Tabel capaian sasaran strategis 2

INDEKS	NILAI
Domain Kebijakan SPBE	1,88
Kebijakan Tata Kelola SPBE	1,57
Kebijakan layanan SPBE	2,10
Domain Tata Kelola	2,14
Kelembagaan	2,50
Strategi dan Perencanaan	2,50
TIK	1,67



Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Realisasi Nasional Tahun 2018

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementrian	LPNK	Lembaga Lain	Prov	Kab	Kota
Domain Kebijakan	1.75	2.68	2.36	1.76	2.05	1.53	1.90
Kebijakan Tata Kelola	1.64	2.45	2.20	1.78	1.97	1.43	1.81
Kebijakan Layanan	1.82	2.84	2.47	1.74	2.10	1.61	1.94
Domain tata Kelola	1.74	2.71	2.67	2.08	2.08	1.50	1.90
Kelembagaan	1.61	2.51	2.37	1.91	1.85	1.39	1.79
Strategi dan Perencanaan	1.80	2.63	2.63	2.07	2.22	1.56	1.98
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.79	2.88	2.89	2.21	2.13	1.53	1.90
Sasaran Strategis "Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi"							
Domain Layanan SPBE	2.17	3.20	2.87	2.14	2.44	1.98	2.39
Administrasi Pemerintahan	2.33	3.31	2.95	2.61	2.63	2.15	2.52
Layana Publik	1.90	3.00	2.73	1.92	2.12	1.66	2.13
Sasaran Strategis "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis E-Government, Data Statistik dan Pengamanan Data"							
Sumber Data :							
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada Bupati Kotawaringin Barat Nomor. B/195/M.KT.03/2019 tanggal 27 Maret 2019 hal Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)							



B. EVALUASI DAN ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA

Analisa capaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum kegiatan dapat berjalan dengan baik, dengan uraian sebagai berikut :

1. Faktor pendukung keberhasilan

Keberhasilan pencapaian capaian kinerja sasaran strategis "*Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi*" Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 dipengaruhi oleh beberapa factor kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

a) Administrasi Pemerintahan

1) Kekuatan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan aplikasi SPBE untuk layanan pengadaan yang telah terintegrasi dengan instansi pusat. Seiring dengan perkembangan jaman, layanan ini perlu untuk selalu dievaluasi dan ditingkatkan fungsinya.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga telah menggunakan aplikasi untuk layanan naskah dinas, manajemen perencanaan, manajemen penganggaran, manajemen keuangan, dan manajemen kinerja. Aplikasi-aplikasi tersebut telah memiliki fungsi yang dapat melakukan transaksi antar penggunanya. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, aplikasi-aplikasi ini perlu dikembangkan sehingga dapat terintegrasi dengan aplikasi lain yang terkait.

2) Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki aplikasi untuk layanan manajemen kepegawaian, namun aplikasi untuk layanan tersebut belum menyediakan fungsi yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi (missal : proses persetujuan secara elektronik). Untuk mendapatkan manfaat yang



maksimal, aplikasi ini perlu dikembangkan sehingga dapat melakukan transaksi. Dan kemudian diintegrasikan dengan aplikasi lain yang terkait.

b) Pelayanan Publik

1) Kekuatan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menggunakan 4 aplikasi untuk layanan publik berbasis elektronik yaitu : aplikasi pengaduan publik, aplikasi layanan perijinan, aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan, dan aplikasi pelayanan pengajuan domain. Ketiga aplikasi tersebut sudah dapat melakukan proses transaksi. Sehingga untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, aplikasi-aplikasi tersebut perlu diintegrasikan dengan aplikasi lain yang terkait. Langkah berikutnya yang perlu diambil adalah evaluasi dan pengembangan aplikasi sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan terkini.

2) Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki aplikasi layanan whistle blowing system. Aplikasi ini diperlukan untuk membantu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Sehingga perlu segera direncanakan untuk mengimplementasikan aplikasi ini. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan aplikasi berbagi pakai ataupun menduplikasi aplikasi yang memiliki fungsi serupa yang telah diimplementasikan di daerah lain.

Aplikasi untuk layanan dokumentasi dan informasi hukum telah dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat, namun aplikasi tersebut belum menyediakan fungsi yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan transaksi (misal: proses persetujuan secara elektronik). Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, aplikasi ini perlu dikembangkan sehingga dapat melakukan



transaksi. Dan kemudian diintegrasikan dengan aplikasi lain yang terkait.

Keberhasilan pencapaian capaian kinerja sasaran strategis "*Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis E-Government, Data Statistik dan Pengamanan Data*" Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 dipengaruhi oleh beberapa factor kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

a) Kebijakan tata Kelola

1) Kekuatan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki kebijakan terkait dengan pembentukan Tim Pengarah. Peran tim pengarah sangat penting untuk kesuksesan implementasi SPBE yang terintegrasi. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, kebijakan ini perlu ditingkatkan sehingga dapat mencakup integrasi SPBE dengan instansi pusat. Kebijakan ini juga perlu dievaluasi secara berkala sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Kebijakan terkait dengan inovasi proses bisnis yang terintegrasi juga sudah dimiliki instansi ini. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, kebijakan tersebut perlu ditingkatkan sehingga dapat mencakup integrasi SPBE dengan instansi pusat. Kebijakan ini juga perlu dievaluasi secara berkala sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada.

2) Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat baru memiliki konsep kebijakan untuk rencana induk SPBE instansi pemerintah, anggaran dan belanja TIK, pengoperasian pusat data, integrasi system aplikasi, dan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai. Konsep kebijakan tersebut perlu segera direalisasikan menjadi kebijakan sehingga



dapat digunakan sebagai dasar untuk implementasi SPBE yang berkualitas.

b) Kebijakan layanan

1) Kekuatan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki kebijakan internal yang mengatur layanan SPBE untuk seluruh kebutuhan instansi. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup layanan manajemen Kepegawaian, layanan manajemen kerja, layanan pengadaan, layanan dokumentasi dan informasi hukum, serta layanan publik instansi pemerintah. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditingkatkan sehingga dapat mencakup integrasi SPBE dengan instansi pusat. Kebijakan ini juga perlu dievaluasi secara berkala sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada.

2) Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki kebijakan untuk layanan whistle blowing system. Kebijakan ini sangat penting untuk membantu menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi. Sehingga perlu untuk segera dibuat kebijakan terkait dengan hal ini.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat baru memiliki konsep untuk kebijakan terkait layanan naskah dinas, layanan manajemen perencanaan dan penganggaran, dan layanan manajemen keuangan. Konsep kebijakan tersebut perlu segera direalisasikan menjadi kebijakan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk implementasi SPBE yang berkualitas.

Kebijakan terkait layanan pengaduan public yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat hanya berlaku untuk sebagian kebutuhan yang ada, sehingga perlu ditingkatkan agar dapat mencakup seluruh kebutuhan instansi.



c) Kelembagaan

1) Kekuatan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki tim pengarah SPBE yang telah melaksanakan tugas serta fungsinya secara keseluruhan. Tugas dan fungsi tim pengarah SPBE perlu untuk selalu dipantau dan dievaluasi secara berkala sehingga perannya dapat ditingkatkan secara berkesinambungan.

2) Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki inovasi proses bisnis terintegrasi, namun penerapannya hanya pada sebagian unit kerja saja. Untuk efektifitas kinerja instansi, inovasi proses bisnis terintegrasi ini perlu ditingkatkan sehingga dapat diterapkan pada keseluruhan unit kerja.

d) Strategi dan Perencanaan

1) Kekuatan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki dokumen rencana induk SPBE yang mencakup seluruh muatan visi dan misi SPBE serta peta jalan SPBE. Hal-hal yang terdapat dalam rencana induk SPBE ini perlu diterapkan secara konsisten dan dievaluasi secara berkala, untuk kemudian dilakukan pemuktahiran sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi yang ada.

2) Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki perencanaan dan penganggaran TIK, namun hanya sebagian saja yang dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK. Untuk efektifitas kinerja instansi, seluruh perencanaan dan penganggaran TIK harus dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK. Perencanaan dan penganggaran TIK ini harus dipantau dan dievaluasi secara berkala,



dan hasilnya digunakan untuk perbaikan di penyusunan anggaran tahun berikutnya.

e) Teknologi Informasi dan Komunikasi

1) Kekuatan

Integrasi merupakan kunci keberhasilan implementasi SPBE. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan integrasi aplikasi walaupun hanya melakukan pada sebagian dari kebutuhan instansi saja

2) Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum menggunakan layanan data center yang disediakan oleh instansi pemerintah/BUMN. Penggunaan layanan data center yang tidak dimiliki oleh instansi pemerintah/BUMN dapat meningkatkan resiko keamanan serta kerahasiaan data yang disimpan didalamnya. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan integrasi system aplikasi dan menggunakan aplikasi umum berbagi pakai. Namun hal tersebut hanya dilakukan pada sebagian saja dari seluruh kebutuhan instansi. Untuk efektifitas kinerja instansi, perlu dilakukan perbaikan sehingga kedua hal tersebut dapat dilakukan untuk seluruh kebutuhan instansi.

Keberhasilan pencapaian capaian kinerja sasaran strategis "*Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi*" Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 dipengaruhi oleh beberapa factor kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

a) Administrasi Pemerintahan

1) Kekuatan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan aplikasi LPSE untuk layanan pengadaan yang terintegrasi dengan instansi pusat. Seiring dengan perkembangan jaman, layanan ini perlu untuk



selalu dievaluasi dan ditingkatkan fungsinya. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga telah menggunakan aplikasi untuk layanan naskah dinas, manajemen perencanaan, manajemen penganggaran manajemen keuangan, dan manajemen kinerja. Aplikasi-aplikasi tersebut telah memiliki fungsi yang dapat melakukan transaksi antar penggunanya. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, aplikasi-aplikasi ini perlu dikembangkan sehingga dapat terintegrasi dengan aplikasi lain yang terkait.

2) Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki aplikasi untuk layanan manajemen Kepegawaian, namun aplikasi untuk layanan tersebut belum menyediakan fungsi yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi (misal: proses persetujuan secara elektronik). Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, aplikasi ini perlu dikembangkan sehingga dapat melakukan transaksi. Dan kemudian diintegrasikan dengan aplikasi lain yang terkait.

b) Pelayan Publik

1) Kekuatan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menggunakan 4 aplikasi untuk layanan public berbasis elektronik, yaitu: aplikasi pengaduan public, aplikasi layanan perijinan, aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan, dan aplikasi pelayanan pengajuan domain. Keempat aplikasi tersebut sudah dapat melakukan proses transaksi. Sehingga untuk mendapatkan manfaat maksimal, aplikasi-aplikasi tersebut perlu diintegrasikan dengan aplikasi lain yang terkait. Langkah berikutnya yang perlu diambil adalah evaluasi dan pengembangan aplikasi sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan terkini.



2) Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki aplikasi layanan Whistle Blowing System. Aplikasi ini diperlukan untuk membantu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Sehingga perlu segera direncanakan untuk mengimplementasikan aplikasi ini. Salah satu alternative yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan aplikasi berbagi pakai ataupun menduplikasikan aplikasi yang memiliki fungsi serupa yang telah diimplementasikan di daerah lain. Aplikasi untuk layanan dokumentasi dan informasi hukum telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, namun aplikasi tersebut belum menyediakan fungsi yang memungkinkan penggunaanya untuk melakukan transaksi (missal: proses persetujuan secara elektronik). Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, aplikasi ini perlu dikembangkan sehingga dapat melakukan transaksi. Dan kemudian diintegrasikan dengan aplikasi lain yang terkait.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi Anggaran Tahun 2018

Dalam mencapai target indicator program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 secara umum terlaksana dengan baik sesuai target, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.278.378.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.977.677.116,00 atau sebesar 86,80 % efisiensi anggaran sebesar Rp. 300.700.884 atau 13,19 % dengan rincian realisasi sebagai berikut :



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN			
		PAGU	REALISASI	%	SISA
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.115.509.700	901.412.918	80,81	214.096.782
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	102.318.000	102.314.000	100,00	4.000
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	58.800.000	54.811.700	93,22	3.988.300
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	131.000.000	122.900.000	93,82	8.100.000
5	PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.170.500	66.793.299	92,55	5.377.201
6	PROGRAM IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT	235.677.900	207.403.615	88,00	28.274.285
7	PROGRAM LAYANAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	218.966.000	204.480.481	93,38	14.485.519
8	PROGRAM LAYANAN PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	322.835.900	300.471.103	93,07	22.364.797
9	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	21.100.000	17.090.000	81,00	4.010.000
	TOTAL	2.278.378.000	1.977.677.884	86,80 %	300.700.884



Dalam mencapai sasaran strategis program dan kegiatan sebagaimana dalam terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 untuk sasaran strategis "*Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi*" Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 541.801.900,00 terealisasi sebesar Rp. 504.951.584,00 atau sebesar 93,20 % efisiensi anggaran sebesar Rp. 36.850.316 atau 6,80 % disajikan sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran IKU Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN			
	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
<i>Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi</i>				
JUMLAH MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK YANG DILAKSANAKAN	36.055.000,00	33.390.000,00	92,61	2.665.000,00
JUMLAH INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH YANG DIKELOLA	61.961.000,00	57.690.481,00	93,11	4.270.519,00
JUMLAH KONTEN MEDIA PUBLIK YANG DIKELOLA	120.950.000,00	113.400.000,00	93,76	7.550.000,00
JUMLAH KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK YANG DIKEMBANGKAN	58.335.000,00	45.705.000,00	78,35	12.630.000,00
JUMLAH P LAYANAN HUBUNGAN KOMUNIKASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIKEMBANGKAN	234.850.900,00	233.119.413,00	99,26	1.731.487,00
JUMLAH LAYANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH YANG DISEDIAKAN	29.650.000,00	21.646.690,00	73,01	8.003.310,00
TOTAL	541.801.900,00	504.951.584,00	93,20	36.850.316,00

Untuk sasaran strategis "*Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis E-Government, Data Statistik dan Pengamanan Data*" Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 328.948.400,00 terealisasi sebesar Rp. 291.286.914,00 atau sebesar 93,20 %



efisiensi anggaran sebesar Rp. 37.661.486,00 atau 11,44 % disajikan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN			
	PAGU	REALISASI	%	SISA
<i>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis E-Government, Data Statistik dan Pengamanan Data</i>				
JUMLAH INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI (tik) YANG DISEDIAKAN DIKEMBANGKAN DAN DIPELIHARA	34.455.500,00	33.553.499,00	97,38	33.553.499,00
JUMLAH INFORMASI YANG DIKELOLA DAN DIAMANKAN	37.715.000,00	33.239.800,00	88,13	33.239.800,00
JUMLAH SUMBER DAYA TIK YANG DIKEMBANGKAN	36.965.000,00	29.419.306,00	79,59	29.419.306,00
JUMLAH TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG DITERAPKAN	52.605.000,00	52.345.760,00	99,51	52.345.760,00
JUMLAH SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI YANG DIKEMBANGKAN	146.107.900,00	125.638.549,00	85,99	125.638.549,00
JUMLAH DOKUMEN DATA DAN STATISTIK DAERAH	21.100.000,00	17.090.000,00	81,00	17.090.000,00
TOTAL	328.948.400,00	291.286.914,00	88,55	37.661.486,00

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 meliputi:

a) Keuangan

Efisiensi penggunaan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan IKU tahun 2018 sebesar 94,01 %, yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp. 870.750.300,- memiliki realisasi sebesar Rp. 818.603.295,-



b) Sarana dan Prasarana

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana antara lain dalam pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat, selain melalui dialog public, bias dilakukan melalui aplikasi berbagi pakai Sarana Pengaduan dan Aspirasi (SAPA) sehingga untuk masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari pusat kota dapat menghemat biaya dalam penyampaian aspirasi dan pengaduan, sekaligus langsung didistribusikan kepada SKPD terkait agar segera ditindaklanjuti.

c) Sumber Daya Manusia

Dengan didukung jumlah SDM sebanyak 42 orang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memperoleh capaian kinerja 100%. Hal ini yang dilakukan antara lain dengan mengoptimalkan beban tugas pegawai serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas, serta melibatkan tim teknis pada beberapa kegiatan. Namun demikian hal tersebut bukan merupakan kondisi yang ideal bagi organisasi. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung akan menurunkan kinerja personil yang berdampak kepada menurunnya kinerja organisasi



BAB VIII

PENUTUP

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dalam rangka pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Laporan kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan transparansi setiap gerak dan aktivitas pembangunan dalam upaya menciptakan *Good Government* sesuai dengan tuntutan paradigma.

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 secara umum tercapai 100%, untuk penyerapan anggaran sebesar 94,01%. Sedangkan capaian kinerja sasaran 1 sebesar 100%, pencapaian kinerja sasaran 2 sebesar 100%, diinterpretasikan sangat berhasil, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dapat kami atasi dengan baik.

Walaupun hasil kinerja yang didapat semakin meningkat, namun masih terdapat beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan antara lain :

1. Melakukan pengembangan tata kelola sebagai upaya peningkatan pelayanan public
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan berjenjang dengan memanfaatkan prasarana yang ada, antara lain absensi fingerprint dan pemantauan kinerja untuk meningkatkan capaian kinerja
3. Melakukan peningkatan kompetensi SDM aparatur, agar cepat tanggap dalam memprediksi dan mendeteksi dini perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi dan Nasional

Demikian laporan kinerja ini kami sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan. Apabila masih banyak terdapat



kekurangan atas laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akan kami lakukan menjadi lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya.

KEPALA DINAS,

RODY ISKANDAR, S. Sos., M.Si.

NIP. 19690831 199012 1 003



LAMPIRAN-LAMPIRAN